



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD YANI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 261415

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **185.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **329.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 E AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, JETWIN JW 250 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. MOTOR, HONDA CRF250RLH IN MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
6. MOTOR, VESPA 3 SPEED 90 CC Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
7. MOTOR, ROYAL ENF BULLET CLASSIC 350 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. MOTOR, YAMAHA B65 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **37.300.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	358.347.036
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	910.147.036
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	910.147.036

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.